

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut :

Frans Silitonga (2009) melakukan penelitian yang dilakukan di Bank Mandiri dalam melakukan penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada analisa aspek keuangan dengan menggunakan rumus-rumus rasio keuangan secara horizontal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploitasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan dan karakteristik sebenarnya dari satu objek penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa calon nasabah yang hendak mengajukan permohonan kredit pada PT Bank Mandiri, Tbk harus mempersiapkan data yang bersifat keuangan dan data yang bersifat non keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah, para analis menggunakan empat rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas/leverage. Selain menganalisis informasi laporan keuangan, para analisis juga menganalisis jaminan/agunan yang dimiliki oleh nasabah serta memeriksa mutasi rekening calon nasabah. Dari hasil regresi linier sederhana disimpulkan bahwa informasi laporan keuangan berperan terhadap kebijaksanaan pemberian kredit pada PT Bank Mandiri, Tbk Cabang Medan.

Sastro Herbeth Simamora (2009) yang melakukan penelitian yang dilakukan di PT Bank BRI (Persero) Tbk dalam melakukan penelitian ini peneliti menganalisis laporan keuangan perusahaan yaitu neraca dan laporan laba rugi, dengan menggunakan analisis besaran kredit apabila dinyatakan layak untuk diberikan kredit. Data yang digunakan dalam pembahasan adalah data laporan

keuangan calon debitur berupa laporan neraca dan laporan laba selama tiga tahun periode yaitu periode tahun 2006 - 2008. Dari perhitungan dan analisis rasio yaitu, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas/leverage calon debitur memiliki kinerja perusahaan yang cukup baik, dan dinyatakan layak untuk menerima kredit.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham) pemerintah (instansi pajak) kreditor (bank atau lembaga keuangan) maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Laporan keuangan pada hakekatnya bersifat umum dalam arti laporan keuangan tersebut ditujukan untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Kreditor berkepentingan dalam pemberian pinjaman kepada perusahaan dan pemerintah (khususnya instansi pajak) berkepentingan dalam penentuan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Budi, 2007 : 53).

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan-laporan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam hal ini lembaga perbankan pada periode tertentu bertujuan antara lain (Dwi Prastowo, 1995) :

1. Memberikan informasi tentang posisi keuangan bank menyangkut harta bank, kewajiban bank serta modal bank pada periode tertentu.
2. Memberikan informasi menyangkut laba rugi suatu bank pada periode tertentu.

3. Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang disajikan suatu bank.
4. Memberikan informasi tentang performance suatu bank.

2.2.3. Komponen Laporan Keuangan Bank

Dalam menyajikan informasi tentang laporan keuangan, pihak bank memiliki laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Keuangan Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Sedangkan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang efektif mulai berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini :

- a. laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
- b. laporan laba rugi komprehensif selama periode
- c. laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. laporan arus kas selama periode
- e. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
- f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Neraca

2.3. Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan/bank kepada seseorang atau badan usaha

berlandaskan kepercayaan (faith). Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan kredit adalah (Untung Budi, 2000 : 1) :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan “

2.3.2 Unsur-unsur Kredit

Dalam pengertian kredit tersebut di atas terkandung unsur-unsur kredit itu sendiri, yaitu unsur (Untung Budi, 2000 : 3) :

1. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak.
3. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur meyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.
4. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.
5. Persetujuan/perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujaun dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

2.3.3. Tujuan Kredit

Perkerditan melibatkan beberapa pihak ; kreditur (bank), debitur (penerima kredit), otoria moneter, dan bahkan masyarakat pada umumnya. Oleh, karena itu tujuan perkerditan berbeda-beda dan tergantung pada pihak-pihak tersebut (Jopie Jusuf, 2006)

1. Bagi kreditur (Bank)

- Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya.
- Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan.
- Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bank.

2. Bagi debitur :

- Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan performance (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya.
- Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
- Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

3. Bagi Otorita :

- Kredit berfungsi sebagai instrumen moneter.
- Kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber-sumber pendapatan negara.
- Kredit berfungsi sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi, dan mengurangi pemborosan di semua lini.

4. Bagi masyarakat :

- Kredit dapat menimbulkan backward dan forward linkage dalam kehidupan perekonomian.
- Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan
- Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli (social buying power).

2.3.4. Jenis Kredit

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Macam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan atau dari berbagai kriteria lainnya.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi (Kasmir, 2002:99) antara lain :

a. Dilihat dari segi kegunaan

1. Kredit Investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
2. Kredit modal kerja, kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari tujuan kredit

1. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
2. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
3. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit jangka menengah, kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang memiliki masa pengembalian antara tiga sampai lima tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
2. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

2.3.5. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun. Sedangkan pengertian modal kerja adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku/bahan penolong/bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya overhead, proses produksi barang samapai dengan barang

tersebut dijual atau dengan kata lain sejumlah dana/kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan.

Modal kerja dapat bersifat sementara atau permanen. Modal kerja sementara adalah modal kerja yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek yang sifatnya sementara. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan secara normal. Pengertian lain dari modal kerja adalah *net working capital(NWC)* yang merupakan selisih antara jumlah aktiva lancar dengan jumlah hutang lancar.

Dalam hubungannya dengan pengertian modal kerja dikenal dengan adanya tiga macam konsep yaitu (Suhardjono, 2003: 287) :

1. Konsep modal kerja kuantitatif mendasarkan diri pada kuantitas dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, yaitu aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula hanya memerlukan waktu yang pendek.
2. Konsep modal kerja kualitatif adalah modal kerja yang dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau kewajiban yang harus segera dibayar. Dengan demikian maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera disediakan.
3. Konsep modal kerja menurut konsep modal kerja fungsional mendasarkan diri pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.

2.3.6. Pengertian resiko di bidang perkreditan

Secara umum definisi resiko adalah eksposur terhadap ketidakpastian, sehingga resiko dapat dipecah menjadi dua komponen yaitu ketidakpastian dan eksposur terhadap ketidakpastian (Suhardjono, 2003:73). Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi resiko, yaitu :

- a. Risk is the chance of loss (resiko adalah kans kerugian)
- b. Risk is the possibility of loss (resiko adalah kemungkinan kerugian)
- c. Risk is uncertainty (resiko adalah ketidak pastian)

Definisi lain dari resiko adalah penymipangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (risk is the dispersion of actual from expected results) atau resiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda dari yang diharapkan (risk is the probability of any outcome different from the one expected).

Untuk memudahkan pemahaman resiko, dalam hal ini digunakan pengelompokkan resiko berdasarkan rekomendasi BCG (Boston Consulting Grup) yaitu resiko kredit, resiko pasar dan resiko operasional.

1. Resiko kredit merupakan resiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (default) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.
2. Resiko pasar merupakan resiko kerugian dalam nilai portofolio yang diakibatkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, fluktuasi harga komoditi dan fluktuasi harga saham.
3. Resiko operasional merupakan resiko kerugian yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh kegagalan atau proses-proses operasional yang kurang memadai. Antara lain resiko operasional yang berhubungan dengan proses kredit, proses non kredit, aktivitas treasury, kecurangan (fraud) dan sebagainya.

2.3.7. Jenis – jenis Resiko Kredit di Bidang Perkreditan

Secara garis besar resiko bank dibagi menjadi tiga, yaitu resiko kredit, resiko pasar dan resiko operasional. Dari ketiga resiko tersebut berikut ini akan dijelaskan lebih rinci jenis-jenis resiko yang terjadi di bidang perkreditan.

1. Resiko Dalam Siklus Konversi Aset Usaha Debitur

Dalam siklus konversi aset usaha debitur sudah barang tentu ada resiko bisnis yang kemungkinan akan timbul yang mengakibatkan gagalnya debitur dalam menjalankan usahanya. Secara umum resiko-resiko dalam proses siklus konversi dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu :

a. Resiko yang berasal dari sisi supply (supply risk)

Supply risk dapat terjadi dan timbul di dalam proses pembelian bahan baku atau pembelian barang dagangan dengan kata lain alur perubahan dari kas menjadi bahan baku/barang dagangan dimungkinkan timbulnya resiko-resiko. Resiko tersebut dapat terjadi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan dalam upaya mendapatkan barang dari supplier
- Kegiatan dalam kaitan dengan saat barang berada di gudang
- Kegiatan menjelang proses produksi atau saat barang akan dijual

b. Resiko yang berasal dari sisi produksi (production risk)

Production risk dapat terjadi dan timbul di dalam proses kegiatan produksi. Resiko tersebut dapat terjadi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan berkaitan dengan faktor sumber daya manusia
- Kegiatan berkaitan dengan faktor mesin dan energi yang menggerakkan.
- Kegiatan berkaitan dengan faktor lingkungan.

c. Resiko yang berasal dari sisi penjualan/permintaan (demand risk)

Demand risk dapat terjadi dan timbul di dalam proses kegiatan penjualan barang hasil produksi. Resiko tersebut dapat diidentifikasi dari kondisi sebagai berikut :

- Kondisi kualitas kemasan produk
- Kebijakan harga jual produk
- Kebijakan promosi dan pemasaran produk
- Kondisi pasar.
- Kondisi eksternal.

2. *Resiko Dalam Paket Kredit*

Dalam paket kredit tertuang berbagai analisa berkaitan dengan permohonan kredit. Adapun prinsip dan langkah yang tertuang dalam analisa resiko, antara lain :

a. Prinsip pengelolaan resiko kredit

Dalam rangka mempertahankan portofolio kredit yang sehat, maka resiko kredit harus dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Adanya pemisahan pejabat kredit yang berbeda fungsi.
- Diterapkannya prinsip pemutus kredit minimal 2 orang atau lebih (four eyes principle).
- Diterapkannya prinsip penilaian resiko (risk scoring system).
- Pemisahan pejabat pengelola kredit bermasalah.
- Dan sebagainya.

b. Prosedur perkreditan yang sehat

Perkreditan yang sehat dilakukan dengan cara menghindari konsentrasi pada sektor tertentu atau dengan kata lain melakukan penyebaran resiko pada berbagai sektor usaha. Dalam upaya memberikan kredit yang sehat harus dilakukan pre-screening terhadap berbagai peluang bisnis, yang mencakup antara lain:

- Penetapan pasar sasaran (target market).
- Penetapan kriteria resiko yang dapat diterima oleh bank, baik terhadap debitur lama maupun debitur baru.
- Penetapan rencana pemasaran tahunan.
- Dan sebagainya

c. Analisa resiko dan praktek kredit

Analisa kredit pada dasarnya analisis resiko, oleh karena itu dalam melakukan analisa kredit harus dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dari usaha yang akan dibiayai secara utuh atas semua aspek analisis kreditnya, sehingga dapat diambil kesimpulan apakah permohonan kredit dapat disetujui atau ditolak.

Analisis resiko tersebut mencakup antara lain:

- Watak (character)
 - Kemampuan (capacity)
 - Modal (capital)
 - Kondisi dan prospek usaha (condition)
 - Agunan (collateral)
- d. Analisis penyebab kemungkinan timbulnya resiko
- Keberhasilan dari proses pemberian kredit terletak pada faktor kualitas pejabat kredit yang menanganinya, meliputi :
- Kualitas atau kemampuan untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang akan timbul dari usaha yang akan dibiayai.
 - Kualitas mental atau moral dari para pejabat kredit yang menanganinya yang meliputi adanya kepentingan pribadi (vested interest) dan moral yang kurang baik.

3. *Resiko Dalam Menetapkan Nilai Kurs dan Suku Bunga Kredit Valuta Asing*

Pada saat kondisi suku bunga rupiah relatif lebih murah dibanding suku bunga valuta asing, maka kredit-kredit valuta asing akan dibiayai (sumber dana berasal) dari dan rupiah. Dalam hal ini terdapat mis-match (kesenjangan antara sumber dan penggunaan dana) baik dalam mata uang maupun suku bunga. Untuk mengatasi hal ini pada umumnya dilakukan pemagaran resiko (hedging) agar kerugian dapat dikurangi. Salah satu cara pemagaran resiko adalah dengan transaksi spot, forward, dan swap.

2.4 Jaminan

2.4.1. Pengertian Jaminan

Untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit, bersama-sama dengan unsur-unsur lain bank dapat memperoleh keyakinan

atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya suatu penyaluran kredit tidak selalu harus dengan jaminan kredit, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan atas prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, jika suatu kredit dilepas tanpa agunan maka kredit itu akan memiliki resiko yang sangat besar karena jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula.

2.4.2. Jenis Jaminan Kredit

Jenis jaminan kredit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Jaminan perorangan, yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Menurut Prof. Soebekti karena tuntutan kreditur terhadap seorang penjamin tidak diberikan suatu privelege atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktikkan dalam dunia perbankan.
2. Jaminan Kebendaan antara lain:
 - a. Jaminan atas benda bergerak seperti Gadai dan Fidusia.
 - b. Jaminan atas benda tidak bergerak seperti Hipotik dan Hak Tanggungan.

2.4.3 Fungsi Jaminan Kredit

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari beberapa bentuk dan jenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan Hukum Jaminan. Sehubungan dengan itu adanya persyaratan yang mewajibkan (calon) debitur untuk menyerahkan (memberikan jaminan kredit), maka hal tersebut lebih berkaitan dengan beberapa fungsinya (M.Bahsan, 2007 : 102)

1. *Jaminan Kredit sebagai Pengaman Pelunasan Kredit*

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi kreditur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi bank. Secara umum pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dan melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Khusus mengenai jaminan kredit, untuk pengamannya dapat ditemukan baik pada tahap analisis kredit maupun melalui penerapan ketentuan hukum. Bila dikemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi hutangnya kepada bank sesuai ketentuan perjanjian kredit akan dilakukan pencairan (penjualan) atas objek jaminan kredit yang bersangkutan. Cara pencairan jaminan kredit tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini cara pencairan jaminan kredit terkait dengan berbagai hal, antara lain kepada pengikatnya melalui lembaga jaminan, kemauan debitur untuk bekerja sama dengan bank, bentuk dan jenis jaminan kredit, kemampuan bank untuk menangani pencairan jaminan kredit dan sebagainya.

2. Jaminan Kredit sebagai Pendorong Motivasi Debitur

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dapat dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank. Umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan intern masing-masing bank, nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur yang bersangkutan. Hal ini memberikan motivasi kepada debitur untuk menggunakan kredit sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usahanya secara baik, mengelola kondisi keuangan secara hati-hati sehingga dapat segera melunasi kreditnya agar dapat menguasai kembali hartanya.

3. Fungsi yang Terkait dengan Pelaksanaan Ketentuan Perbankan

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA, persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara pemberian tambahan fasilitas kredit, penilaian terhadap jaminan kredit dalam rangka manajemen resiko kredit, dan sebagainya. Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang perbankan merupakan fungsi lain dari jaminan kredit dan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit secara lengkap lengkap oleh bank sehingga akan merupakan jaminan layak dan berharga.

2.4.4 Objek Jaminan Kredit

Dalam praktik perbankan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kredit biasanya telah diatur oleh peraturan internnya. Peraturan intern tersebut antara lain mengatur tentang objek jaminan kredit yang dapat diterima bank, tata cara penilaiannya dan cara pengikatannya.

Masing-masing dari kelompok jaminan kredit terdiri dari bermacam jenis nama yang kadang-kadang sulit untuk dirinci secara tegas. Barang bergerak yang berupa barang berwujud misalnya, adalah sangat banyak jenisnya walaupun masih dapat dibedakan menjadi beberapa subkelompok, antara lain berupa barang perhiasan, surat berharga, kendaraan bermotor perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kantor, alat berat, alat transportasi laut dan sungai, alat transportasi udara, barang persediaan, barang dagangan, dan sebagainya.

Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan (melekat) dengan tanah seperti rumah tinggal, gedung kantor, gudang, hotel, dan sebagainya. Barang tidak berwujud dapat berupa tagihan, piutang, dan sejenisnya (tetapi untuk surat mempunyai harga mungkin masih perlu penegasan apakah termasuk barang berwujud atau barang tidak berwujud misalnya saldo tabungan dan saldo giro yang seharusnya dibedakan dari bilyet deposito atau sertifikat deposito). Sementara itu penanggungan utang dapat berupa jaminan pribadi (personal guaranty) dan jaminan perusahaan (company/corporate/guaranty). Penanggungan utang lebih dikenal dalam lingkungan perbankan dengan istilah *borgtocht*.

2.4.5. Pembatasan Jenis dan Bentuk Objek Jaminan Kredit

Dari praktik perbankan dapat diketahui bahwa tidak semua jenis barang atau bentuk objek jaminan utang dapat diterima bank dalam rangka kegiatan perkreditannya. Beberapa bank menetapkan secara tegas objek jaminan kredit yang tidak dapat diterimanya, misalnya yang berupa barang persediaan, tanah yang belum bersertifikat, saham, dan sebagainya.

Kebijakan tersebut ditetapkan bank berdasarkan alasan-alasan tertentu dengan memerhatikan kepentingannya, antara lain berupa kemudahan pengikatan, kepastian nilai (harga) dari objek jaminan kredit yang bersangkutan, kemudahan pencairan, kemudahan pengawasan dan pemeliharaan, dan sebagainya.

2.4.6. Tata Cara Penilaian Jaminan Kredit

Terhadap setiap objek jaminan kredit yang diajukan oleh debitur dilakukan penilaian secara hukum dan ekonomi. Sebelum kedua cara penilaian tersebut dilakukan, bank terlebih dahulu telah melakukan penelitian untuk memastikan sejauh mana objek jaminan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit merupakan jaminan yang dapat dipertimbangkannya sesuai dengan kebijakan bank. Dalam hal ini bank perlu memperoleh dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan kredit dan melakukan pula peninjauan atau melihat fisiknya.

Penilaian secara hukum dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas objek jaminan utang dan penggunaannya sebagai jaminan kredit. Dari penilaian hukum diharapkan dapat disimpulkan mengenai penerimaan objek yang bersangkutan sebagai layak atau tidak layak dari segi hukum.

Penilaian secara ekonomi dilakukan dengan memerhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi dari objek jaminan kredit dari penilaian secara ekonomi diharapkan dapat disimpulkan besarnya nilai (harga) dari objek jaminan kredit. Penilaian ekonomi seharusnya dilakukan setelah diketahui kelayakan objek jaminan kredit secara hukum. Hal ini perlu diperhatikan karena sering kali nilai dari suatu barang sangat terkait dengan kelayakannya dari segi hukum.

Akan tetapi, dalam praktik perbankan sering kali mengenai penilaian hukum terhadap objek atau jaminan kredit tidak atau tidak sepenuhnya dilakukan dan bank hanya memerhatikan kondisi fisik dan nilainya secara ekonomi. Keadaan yang demikian ternyata telah merugikan bank pada saat jaminan kredit yang bersangkutan dieksekusi karena bermasalah.

1. *Penilaian Secara Hukum atas Objek Jaminan Kredit*

Penilaian secara hukum atas jaminan kredit dilakukan sesuai dengan jenis dan bentuk jaminan kredit yang diajukan (diserahkan) oleh calon peminjam (debitur).

a) Legalitas Objek Jaminan Kredit

Legalitas suatu barang sering didukung oleh suatu (beberapa) dokumen dan diantaranya diterbitkan (dibuat) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama (judul) dokumen dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitannya, kekuatannya (kedudukannya), dan hal lainnya yang terkait dengan penerbitannya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan dokumen dari objek jaminan kredit akan dapat diketahui berbagai data dan informasi seperti misalnya mengenai nama pemilik, domisili pemilik, letak barang, harga dari barang, ukuran atau spesifikasi barang, dan sebagainya untuk dinilai lebih lanjut kebenarannya. Bila terhadap semua hal yang berkaitan dengan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang tercantum di dalam dokumen sudah dilakukan penilaiannya terutama dari segi hukumnya, akan diketahui legalitasnya.

b) Keabsahan Penggunaan Objek Jaminan Kredit

Dari dokumen barang yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit akan dapat diketahui apakah barang tersebut milik calon peminjam (debitur) atau pihak lain. Bila barang yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit milik pemohon kredit tentunya akan lebih mudah dipertimbangkan bank.

Akan tetapi, bila objek jaminan kredit merupakan milik pihak (orang) lain, maka bank perlu meneliti keabsahan penggunaannya sebagai jaminan kredit kepada bank oleh pemohon kredit. Bank perlu meneliti keabsahan penggunaan barang milik pihak lain yang diajukan oleh pemohon kredit sebagai jaminan kredit untuk menjaminkannya kepada bank. Salah satu dasar hukum tersebut adalah berupa surat kuasa dari

pemilik barang kepada pemohon kredit untuk menggunakan barang miliknya sebagai jaminan kredit kepada bank dengan memerhatikan kecakapan hukum atau kewenangan yang bersangkutan untuk mengeluarkan surat kuasa.

c) Penggunaan Dokumen yang Sah

Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan objek jaminan kredit atau kewenangan pemohon untuk menjaminkannya perlu diteliti dan dinilai oleh bank. Penilaian perlu dilakukan terhadap semua dokumen yang berkaitan dengan penilaian permohonan kredit agar dapat diketahui tentang keabsahannya. Penilaian tersebut sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dilakukan antara lain dengan menelitinya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengecekan kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen dan wawancara dengan pemilik jaminan kredit.

d) Sengketa yang Dapat Melekat pada Jaminan Kredit Perbankan

Secara umum sengketa yang dapat melekat pada suatu jaminan kredit dapat berupa sebagai berikut ;

1. Terdapatnya pembebanan utang lain atas objek jaminan kredit. Dalam hal ini, objek jaminan kredit tersebut berpotensi sengketa sehingga perlu diteliti antara lain mengenai sejauh mana terhadap barang tersebut telah atau tidak diikat dengan suatu lembaga jaminan yang berlaku.
2. Terdapatnya sengketa atas objek jaminan kredit. Sengketa yang terkait dengan suatu objek jaminan kredit sering yang sering ditemukan, misalnya berupa sengketa warisan yang belum terbagi, sengketa pembagian harta gono gini dari suami istri yang bercerai (berpisah), sengketa dalam rangka jual beli barang yang akan dijadikan objek jaminan kredit karena belum dilunasi sepenuhnya sehingga sulit diselesaikan secara hukum, sengketa utang piutang yang dikaitkan dengan objek jaminan kredit dan sebagainya.

e) Peruntukan dan atau Perizinan Penggunaan Objek Jaminan Kredit

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai peruntukan dan atau perizinan penggunaan suatu barang. Bila barang tersebut diajukan pemohon kredit sebagai objek jaminan kredit, maka ketentuan hukumnya perlu diperhatikan oleh bank dalam rangka menilainya.

Di bidang pertanahan terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur peruntukannya, misalnya dengan menetapkan lokasi-lokasi tanah yang diperuntukkan untuk perumahan, prasarana umum, pertamanan dan jalur hijau, daerah industri, daerah perkantoran, dan sebagainya. Kendaraan bermotor selain mempunyai faktur, kuitansi pembelian dan BPKB sebagai bukti kepemilikannya, juga harus mempunyai STNK dan dokumen lain dalam rangka penggunaannya.

f) Kemungkinan Pengikatan Objek Jaminan Kredit

Bagi bank yang menginginkan pengamanan atas kredit yang disalurkan, diperlukan pengikatan yang sempurna atas objek jaminan kredit yang diterimanya. Pengikatan yang sempurna dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu lembaga jaminan yang digunakan.

Pengikatan yang sempurna atas objek jaminan utang sangat terkait dengan suatu lembaga jaminan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktik perbankan tidak selamanya bank menggunakan suatu lembaga jaminan. Dalam hal bank tidak menggunakan suatu lembaga jaminan yang terkait untuk mengikat objek jaminan kreditnya hendaknya disadari tentang beberapa kelemahan bank pada saat pencairan objek jaminan kredit.

2. *Penilaian Secara Ekonomi terhadap Objek Jaminan Kredit*

Penilaian ekonomi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana objek jaminan kredit mempunyai nilai atau harga menurut perhitungan ekonomi. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

a. Jenis dan Bentuk Jaminan

Bank terlebih dahulu telah mengetahui secara jelas mengenai objek jaminan kredit, yaitu apakah merupakan barang bergerak dan apa jenisnya, barang tidak bergerak dan apa jenisnya, penanggungan utang dan apa jenisnya, sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan penilaian secara hukum.

Masing-masing jenis objek jaminan kredit mempunyai nilai ekonomi yang berbeda-beda. Secara umum nilai ekonomi tanah lebih baik dari nilai ekonomi barang persediaan yang berupa barang mentah, atau dari nilai ekonomi borgtocht.

b. Kondisi Objek Jaminan Kredit

Kondisi objek jaminan kredit akan sangat berpengaruh terhadap nilai ekonominya sebidang tanah yang sudah matang (siap untuk dimanfaatkan) akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanah rawa dengan ukuran yang luas sama. Nilai ekonomi bangunan baru akan lebih tinggi dari bangunan bekas pakai. Sehubungan dengan itu, bank harus mempunyai kejelasan tentang kondisi objek jaminan kredit yang diterimanya.

c. Kemudahan Pengalihan Kepemilikan Objek Jaminan Kredit

Suatu objek jaminan kredit yang dengan mudah dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain umumnya akan memiliki nilai ekonomi yang relatif baik.

d. Tingkat Harga yang Jelas dan Prospek Pemasaran

Tingkat harga yang berlaku tidak hanya didasarkan kepada permintaan dan penawaran tetapi juga kepada kestabilan dan prospek perkembangan harganya. Tingkat harga yang jelas sering merujuk kepada harga pasar yang berlaku di masyarakat pada tempat objek jaminan utang yang bersangkutan, tetapi untuk objek jaminan utang tertentu dapat pula diketahui dengan mencari harga rata-ratanya dengan menggunakan berbagai catatan atau data harga yang terjadi yang dapat dipercaya kebenarannya.

Di samping mengenai harga yang jelas, hal lain yang berkaitan dengan nilai ekonomi suatu objek jaminan kredit adalah terdapatnya kemudahan dalam penjualannya bila kemudian harus dicairkan. Objek jaminan kredit yang mempunyai kemudahan dalam penjualannya tersebut harus mempunyai prospek pemasaran yang baik.

e. Penggunaan Objek Jaminan Kredit

Penggunaan atau pemanfaatan objek jaminan kredit dapat mempengaruhi tingkat harga atau nilai ekonominya. Penetapan nilai ekonomi suatu objek jaminan kredit dapat pula dilakukan berdasarkan perkiraan harga eksekusinya sesuai dengan data yang pernah dimiliki bank.

Selanjutnya, dalam menetapkan nilai ekonomi objek jaminan kredit, bank hendaknya tidak terlalu berpedoman pada harga (nilai) yang disebutkan (ditetapkan) oleh pemohon kredit, satu dan lain untuk mencegah terjadinya penggelembungan harga (mark up) yang kemudian akan bermasalah bagi bank dan petugas bank karena dianggap telah merugikan bank. Calon debitur selalu berupaya untuk menggelembungkan harga (nilai) objek jaminan kredit yang diajukannya kepada bank dan oleh karena itu, bank wajib menilainya secara wajar sesuai dengan ketentuan intern bank (M. Bahsan, 2007:108-123).

2.5 Analisis Laporan Keuangan

2.5.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “analisis” sendiri didefinisikan sebagai berikut: “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dari pemahaman arti keseluruhan.”

Menurut pengertian ini, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

2.5.2. Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah untuk menentukan arah analisis, batasan-batasan dalam analisis, dan hasil yang diharapkan. Berikut ini beberapa contoh tujuan analisis keuangan (Mamduh, 2009 : 6-9) :

1. Investasi Pada Saham

Risiko yang berkaitan dengan investasi saham pada dasarnya sama dengan resiko yang berkaitan dengan perusahaan pada umumnya. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah kondisi perekonomian seperti resesi, inflasi, faktor-faktor industri seperti persaingan, perubahan teknologi, kekuatan tawar-menawar dari supplier, pembeli, tersedianya barang-barang substitusi, faktor-faktor dari perusahaan itu sendiri seperti kualitas manajemen, goodwill, dipunyai, paten-paten yang dipunyai. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, dan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Analisis risiko bisa difokuskan pada kemampuan perusahaan melewati masa-masa sulit dan kemudian memproyeksikan kemampuan ini untuk periode-periode masa mendatang.

2. Pemberian Kredit

Dalam analisis ini, yang menjadi tujuan pokok adalah menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Fokus dalam analisis ini adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjang.

3. Kesehatan Pemasok (Supplier)

Perusahaan ingin memastikan bahwa pemasok tersebut sehat dan bisa beratahan terus. Dengan kemungkinan kerja sama yang terus-menerus, analisis dari pihak perusahaan akan berusaha menganalisis profitabilitas perusahaan pemasok, kondisi keuangan, kemampuan untuk menghasilkan kas untuk memenuhi operasi sehari-harinya dan, kemampuan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.

4. Kesehatan Pelanggan

Analisis yang dilakukan akan tergantung pada besarnya kredit, jangka waktu kredit, jenis usaha atau pelanggan, besar kecilnya usaha pelanggan dan lain-lain.

5. Karyawan atau calon karyawan barangkali akan tertarik menganalisis perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan atau perusahaan yang akan dimasuki memiliki prospek keuangan yang bagus.

6. Pemerintah bisa menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan, atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar bagi suatu industri.

7. Analisis Internal

Pihak internal perusahaan sendiri (seperti pihak manajemen) akan memerlukan informasi mengenai kondisi perusahaan untuk menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan. Informasi semacam ini bisa digunakan sebagai basis evaluasi prestasi manajemen.

8. Analisis Pesaing

Kondisi keuangan pesaing bisa dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. Informasi semacam ini bisa dipakai untuk penentuan seperti strategi harga, strategi merebut pangsa pasar, atau keputusan-keputusan lainnya.

9. Penilaian Kerusakan

Kadangkala analisis keuangan juga bisa dipakai untuk menentukan besar kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Informasi ini bisa dipakai untuk menentukan besar ganti rugi yang dibayarkan ke perusahaan.

2.5.3 Analisis Pemberian Kredit

Sebelum suatu kredit diputuskan terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakan kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Jika hal ini terjadi kemungkinan besar bank akan mengalami kerugian karena ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kemanan kredit (safety), harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
2. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (suitability). Kredit yang digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Menguntungkan (profitable). Kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun nasabah.

Melakukan analisis kredit ada dua tahap yang akan dilakukan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisa kualitatif penilaian dilakukan dengan menilai keadaan perusahaan. Sedangkan dalam analisa kuantitatif penilaian dilakukan dengan menilai rasio-rasio yang ada dalam laporan keuangan.

2.5.4 Analisis Kualitatif

Menurut Dalam melakukan analisis kualitatif ada beberapa prinsip dalam penilaian permohonan kredit, seperti (Kasmir, 2008 : 109) :

1. Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C

- a. Character (watak/kepribadian) dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebagai yang paling penting, sebelum memutuskan/memberikan kredit kepadanya. Bank sebagai pemberi kredit perlu meyakini benar terlebih dahulu, apakah calon debiturnya itu :
 - Berkelakuan baik, dalam arti tidak membiasakan diri beringkar janji, dan selalu berupaya untuk memenuhi janjinya.
 - Tidak mempunyai predikat penjudi, pencuri, pemabuk, atau penipu.
- b. Capacity (Kemampuan) calon debitur dalam menjalankan usahanya harus diketahui pasti oleh pihak bank (calon kreditur). Kemampuan pengusaha akan memberikan kejelasan kepada analis, sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya pendapatan pengusaha (seseorang/badan), dari waktu ke waktu dari musim ke musim. Data sumber yang dapat dipergunakan oleh bank untuk itu, dapat diperoleh selain dari pembukuan dan catatanyang ada pada calon debitur, juga dapat diperoleh dari instansi-instansi, jawaban, pejabat setempat, dan sebagainya.
- c. Capital (Modal) calon debitur perlu diketahui dan diteliti oleh Bank (calon kreditur), selain dari jumlahnya perlu diketahui strukturnya pula. Analisis dalam keperluan ini akan memerlukan Laporan Keuangan dari calon debitur (bila perlu harus yang sudah diaudit). Karenanya kita harus selalu ingat/hafal akan arti dari Likuiditas dan Solvabilitas, karena akan menyangkut kemungkinan pembelian kredit jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), yang menyangkut/mempengaruhi/mendorong calon debitur perlu mendapat sorotan bank. Mungkin sekali terdapat kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif atau negatif terhadap usaha calon debitur.

- e. Collateral (Jaminan/Agunan) atas setiap kredit. Collateral adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya, diikat sebagai agunan/tanggungan. Andai pada suatu saat ternyata debitur tidak mampu menyelesaikan kreditnya, maka agunan tersebut diambilalih/dijual/dilelang oleh kreditur setelah pengadilan memberikan pengesahannya.

Dengan demikian kita dapatkan adanya dua fungsi mengenai jaminan itu, ialah :

- Faktor penentu dalam pemberian kredit.
- Faktor pengaman atas kredit yang diberikan.

2. Analisis kredit berdasarkan prinsip 7P

- a. Personality yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
- b. Party (Golongan) dari calon-calon peminjam. Bank perlu menggolongkan calon-calon debiturnya menjadi beberapa golongan menurut :
 - Character
 - Capacity
 - Capital
- c. Purpose (Tujuan) penggunaan kredit menurut calon debitur, perlu segera dilakukan oleh bank, mengingat erat sekali hubungannya dengan “Economy Condition”. Bank perlu tahu apakah kredit yang diminta calon debitur itu, akan mempunyai aspek ekonomis dan aspek sosial yang positif.
- d. Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa memiliki prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

- e. Payment (Sumber pembayaran), bila rencana penggunaan kreditnya telah diketahui serta tergolong kepada aspek yang memberikan dampak sosial dan ekonomis yang positif, analis harus memperkirakan apakah calon debitur akan mampu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang diperkirakan akan cukup untuk dipergunakan pengembalian kredit dengan bunganya baik sekaligus maupun cicilan.
- f. Profitability (Kemampuan memperoleh laba) calon debitur harus memperoleh perhatian analis. Seseorang/sesuatu badan calon debitur yang mampu memperoleh keuntungan forecast usahanya, diukur dengan jumlah bunga dan ongkos-ongkos kreditnya harus dibayarnya. Bila ternyata diperkirakan masih mempunyai jumlah lebih setelah dikurangi dengan pokok kredit, bunga dan ongkos-ongkosnya maka usaha adalah baik.
- g. Protection (Perlindungan) atas perusahaan dan jaminan yang diberikan oleh calon kreditur itu cukup aman, perlu mendapat perhatian analis. Hal ini sangat penting, untuk menghindari peristiwa yang mungkin timbul sedangkan tidak dapat diperkirakan akan terjadi atau tidak (sukar diduga).

2.5.5 Analisis Kuantitatif

Rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabung-gabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan laba rugi dan neraca. Dengan cara rasio semacam itu diharapkan pengaruh perbedaan ukuran akan hilang (Mamduh, 2009:76).

Untuk dapat menilai efektivitas komponen rasio maka analisis laporan keuangan maka digunakan rasio- rasio berikut ini :

1. Rasio Likuiditas

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang paling banyak dipakai untuk mengukur likuiditas perusahaan adalah

a. Rasio lancar (current ratio)

Rumus untuk mencari rasio lancar :

$$= \frac{AktivaLancar(CurrentAssets)}{UtangLancar(currentLiabilities)} \times 100 \%$$

Current ratio menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar (current liabilities) dijamin pembayarannya oleh Aktiva Lancar (Current Assets).

Sering dikatakan bahwa suatu perusahaan adalah likuid apabila Current Ratio lebih besar dari satu. Secara umum hal tersebut dapat dikatakan benar, tetapi jawaban yang lebih tepat adalah belum tentu sebab sangat tergantung dari kualitas Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar yang dimaksud.

2. Rasio Solvabilitas

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (kreditur) dalam hal ini adalah bank yang kita wakili.

a. Total Debt to Equity Ratio

Menunjukkan bagian dari setiap modal rupiah sendiri yang dijadikan jaminan seluruh hutang.

$$= \frac{TotalDebt}{Owner'sEquity} \times 100 \%$$

b. Total Debt to Total Asset

Merupakan bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan hutang, atau merupakan bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang.

$$= \frac{TotalDebt}{TotalAssets} \times 100 \%$$

3. Rasio Profitabilitas

Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba/keuntungan. Untuk para pemegang saham (pemilik perusahaan), rasio ini menunjukkan tingkat penghasilan mereka dalam investasi.

a. Gross Profit Margin

Menunjukkan laba bruto setiap rupiah penjualan

$$= \frac{\text{Gross Profit on Sales}}{\text{Net Sales}} \times 100 \%$$

b. Return On Asset

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.

$$= \frac{\text{Net Assets}}{\text{Total Assets}}$$

4. Rasio Activity

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola sumber-sumber dananya.

a. Receivable Turnover

Merupakan kemampuan dana yang tertanam pada piutang berputar dalam periode tertentu.

$$= \frac{\text{Net Sales on Credit}}{\text{Average Receivable}}$$

b. Inventory Turnover

Merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam inventori berputar pada suatu periode tertentu, atau likuiditas dari inventori dan kecenderungan adanya overstock.

$$= \frac{\text{Cost of Goods Sold}}{\text{Average Inventory}}$$

c. Turnover Fixed Assets

Menunjukkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya.

$$= \frac{\text{Net Sales}}{\text{Fixed Assets}}$$

d. Total Asset Turnover

Menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan harta, berputar pada periode tertentu, kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue.

$$= \frac{NetSales}{TotalAssets}$$

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

